





Proyek Mangkrak...

Sampai saat ini, ia dan warga lainnya belum mendapat kejelasan terkait dengan kelanjutan proyek itu. "Ada warga sini yang pensiunan pegawai Pemkot, katanya dua minggu lagi akan diselesaikan. Tapi saya dengar di radio Pak Haryadi mengatakan belum bisa memastikan," kata dia pada wartawan, Rabu (28/8).

KPK menetapkan dua jaksa sebagai tersangka yang diduga menerima uang terkait lelang proyek saluran air hujan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja tahun anggaran 2019. Jaksa yang jadi tersangka adalah Eka Safitra sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Jogja sekaligus anggota TP4D dan Satriawan Sulaksono sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta.

Satriawan diduga sebagai orang yang mengenalkan Eka Safitra dengan kontraktor proyek, Gabriella Yuan Ana Kusuma. Adapun, Jaksa Eka Safitra diduga menerima suap jatah 5% dari nilai proyek atau sekitar Rp415 juta. Pemberian uang itu dilakukan bertahap. Gabriella Yuan Ana Kusuma sebagai kontraktor proyek juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sri Budiyanti mengatakan proyek yang terhenti itu sangat mengganggu aktivitas warga. Ia merasakan banyak debu dimana-mana akibat lalu lintas kendaraan di sekitar proyek. Akibatnya banyak warung yang memilih tutup. Jika ada yang buka, intensitas pelanggannya bisa dipastikan lebih sepi.

Sejak dimulai pengerjaannya, yakni pada Senin (5/8), banyak warung sudah tutup. Sementara Jalan Babaran ditutup untuk akses mobil, kecuali warga setempat. "Ada laundry yang biasa pakai mobil, sekarang jadi sepi," katanya.

Ia juga khawatir jika proyek dibiarkan mangkrak terlampaui lama bukan saja mengganggu aktivitas, tapi juga membahayakan orang di sekitarnya. Meski belum ada yang terperosok, tapi ramainya lalu lintas dan anak-anak di sekitar proyek patut diwaspadai.

Kekhawatirannya bertambah mengingat saat ini sudah semakin dekat dengan musim hujan. "Kalau hujan bisa payah, aliran dari selokan di Batikan bisa meluap. Jadi kami berharap segera diselesaikan saja," ujarnya.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan dari

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyarankan untuk dihentikan. Namun, menurutnya, jika dihentikan yang kasihan adalah masyarakat sekitar. Sementara jika dilanjutkan, ia masih belum tahu siapa yang akan menjalankan.

"Maka kami perlu konsultasi dengan KPK atau pihak-pihak yang lain untuk bagaimana kita harus menyelesaikan persoalan ini. Terutama persoalan proyeknya, apakah akan dihentikan atau dilanjutkan. Kalau dihentikan ya harus dikembalikan fungsi jalannya," kata dia.

Ia mengungkapkan sampai sekarang belum mendapat jawaban dari KPK terkait dengan perkembangan kasus ini, khususnya pemeriksaan di Balai Kota pekan lalu. "Makanya belum tahu, kami masih menunggu," ujarnya.

Kepala Dinas PUPKP Kota Jogja, Agus Tri Haryono, mengatakan pascakasu ini proyek dihentikan. Sebagai tindak lanjut, Pemkot akan mengaudit dahulu pengerjaan bersama Inspektorat dan Konsultan Manajemen Konstruksi. "Dilihat berapa persen yang sudah dikerjakan, nanti baru diambil langkah selanjutnya," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005